

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Politik berasal dari kata Yunani, *polis* yang berarti kota atau negara. Aristoteles (384-322 SM) dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut *zoon politikon*. Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara.

Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).

Di zaman modern ini politik di Indonesia mengalami banyak perkembangan. Semakin maju perkembangan dalam dunia politik tersebut membuat terjadi banyak kegoncangan dalam pemerintahan karena keinginan untuk menjadi orang berkuasa dan memiliki segalanya cara. Sebab pemerintah

saat ini tidak memiliki barometer yang cocok buat perkembangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Indonesia. Dalam menentukan demokrasi yang dijalankan, sehingga kemerdekaan untuk mengajukan pendapat tidak sesuai dengan demokrasi yang sesungguhnya.

Politik yang ada di Indonesia saat ini sebagian besar dijadikan sebagai ajang pembuktian diri atas kekuasaan serta menaikkan harkat dan martabat saja. Karena dalam perkembangannya dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat dapat terjun dalam dunia politik. Sehingga terkadang dalam perjalanannya politik di Indonesia terjadi banyak kontroversi yang mengakibatkan banyak kerugian bagi Negara. Terutama dalam permasalahan pemberantasan korupsi.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana. Mubaryanto, Penggiat ekonomi Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan tentang korupsi bahwa, salah satu masalah besar berkaitan dengan keadilan adalah korupsi, yang dilakukan menjadi “KKN”. (<http://intl.feedfury.com>) diakses pada tanggal 17/02/2010 pukul 14.00.

Korupsi di Indonesia saat ini merupakan sebuah budaya baru yang sudah mengakar pada benak setiap rakyat terutama wakil rakyat, wakil rakyat yang ada di Indonesia kurang memiliki rasa kecintaan untuk membawa negara ini untuk lebih berkembang sehingga mereka hanya mencari kekayaan sendiri tanpa memikirkan keadaan rakyat yang ada dibawah mereka.

Tanpa disadari, kerugian negara yang diakibatkan banyaknya korupsi dalam berbagai bentuk menjadikan negara semakin terpuruk, karena kerugian yang ditanggung sangatlah besar. Pemerintah dengan segala kebijakannya membentuk badan khusus untuk pemberantasan korupsi untuk menanggulangi kasus yang mengakar di negara Indonesia.

Contohnya saja kasus obligor BDNI (Bank Dagang Negara Indonesia) yang sudah ada sejak tahun 2001. Kasus bank ini berbelit-belit karena banyak campur tangan orang-orang besar yang membantu para koruptor untuk pemutihan dalam kasus ini sehingga keberadaan Syamsul Nursalim sebagai bos dari bank BDNI yang harus bertanggung jawab sampai detik ini belum diketahui keberadaannya, Nursalim melarikan diri ke luar negeri. Kasus ini begitu menggelitik karena sudah empat periode kepresidenan belum juga dapat teratasi kasus ini.

Pada tahun 2005 dibentuklah Badan anti korupsi yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dulu diketuai oleh Antasari Azhar. Sepanjang perjalanan tahun 2005 sampai dengan 2017, komisi ini telah banyak memberantas kasus-kasus korupsi sehingga membuat masyarakat lebih transparan tentang keadaan perekonomian di Indonesia.

Berawal dari situ mulai terkuaklah berbagai macam kasus korupsi yang mencengangkan serta merontokkan perekonomian negara. Satu persatu para koruptor mulai *kebakaran jenggot* karena dihantui oleh para pemberantas korupsi. Sehingga terjadi permainan politik yang panjang dan berbelit-belit. Apabila sudah terbongkar satu kasus, maka terkuaklah siapa saja yang berada di belakangnya.

Berkelit dan saling tuduh kerap terjadi selama kasus korupsi tersebut diproses. Salah satu kasus yang sempat menggemparkan dunia politik di Indonesia pada tahun 2017 adalah kasus suap yang diterima oleh Kasi III Intel Kajati Bengkulu Parlin Purba yang menyalahgunakan wewenang penyelidik untuk melakukan tindakan pemerasan pada proyek bermasalah sebesar Rp 160 juta.

Parlin Purba sebagai tersangka dalam kasus menerima suap dari proyek bermasalah, dia ditangkap saat duduk di kursinya yang berada tepat di belakang meja Kajati Sendjun karena kasus suap. Berada di tengah-tengah sekian banyak rekan, Parlin sempat memberikan perlawanan. Namun, semua yang hadir di tempat itu tidak bisa berbuat apa-apa setelah mengetahui bahwa yang menangkap Parlin adalah petugas KPK. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Parlin dilakukan 9 Juni dini hari, pukul 01:00 WIB. Selain Parlin, dua orang juga ditangkap dalam OTT tersebut. Yaitu pejabat pembuat komitmen (PPK) di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Amin Anwari (AA) dan direktur PT. Muko-muko Putra Selatan Manjuto (PT. MPSM) Murni Suhardi (MSU).

“Barang bukti yang kami amankan Rp 10 juta,” ungkap Basaria. Namun, Rp 10 juta itu merupakan sebagian kecil dari nilai komitmen yang diberikan. Diduga, Parlin telah menerima lebih dari Rp 150 juta untuk proyek-proyek lain di BWSS VII. “Uang tersebut tidak hanya untuk satu proyek, tapi beberapa proyek”, bebarnya. Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata, menuturkan bahwa nilai proyek irigasi BWSS VII mencapai Rp 90 miliar.

Proyek itu dikerjakan beberapa kontraktor. Salah satunya PT. MPSM. “Untuk itu, saat ini sedang ditelusuri semua proyeknya,” Ucapnya. (Jawa Pos edisi 10 Juni 2017). Dalam berjalannya waktu berita tentang penyusunan lembaga hukum negara di tingkat Kejaksaan Tinggi Bengkulu, media juga sangat ikut andil dalam penyebaran perkembangan berita ini.

Media massa merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan akan informasi bagi masyarakat. Sedangkan definisi media massa itu sendiri terbagi dalam dua macam, yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Pers dalam arti sempit meliputi media cetak dan media elektronik. (Rachmadi dalam Eriyanto, 2002:35). Pers itu sendiri memiliki empat fungsi khusus, yaitu fungsi memberikan informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi, untuk kontrol sosial. Dari sini bisa kita lihat bahwa media massa memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi moral, sosial dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat.

Jalan kebebasan pers yang dibuka lebar-lebar sejak era informasi dimaknai tidak untuk kepentingan kalangan jurnalis semata. Namun kebebasan dan kemerdekaan pers tersebut demi kepentingan publik untuk mendapatkan berbagai informasi yang transparan, akurat dan objektif.

Independent dan *obyektivitas* merupakan dua kata kunci yang menjadi kiblat dan klaim setiap jurnalis di seluruh dunia. Seorang jurnalis selalu menyatakan dirinya telah bertindak obyektif, seimbang dan tidak berpihak pada kepentingan apa pun kecuali keprihatinan dan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.

Meskipun sikap independen dan *objektivitas* menjadi kiblat setiap jurnalis, pada kenyataannya seringkali didapati suguhan berita yang beraneka ragam dari sebuah peristiwa yang sama. Berangkat dari peristiwa yang sama, media tertentu mewartakannya dengan cara menonjolkan sisi atau aspek tertentu, sedangkan yang lainnya meminimalisir, memelintir bahkan menutup sisi aspek tersebut dan sebagainya. Ini semua menunjukkan di balik jubah kebesaran independensi dan objektivitas, seorang jurnalis menyimpan paradoks, tragedi bahkan ironi (Eriyanto,2002:v)

Begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh Althusser dan Gramsci bahwa media massa bukan suatu yang bebas, *independent* tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial, ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa maka media massa tidak mungkin berdiri ditengah-tengah, dia akan bergerak dinamis di antar pusaran-pusaran kepentingan yang sedang bermain. (Sobur, 2006:30).

Lebih dari itu, penyampaian sebuah berita ternyata menyimpan *subjektivitas* penulis. Namun, berbeda dengan kalangan tertentu yang ,memahami betul gerak pers. Mereka akan menilai lebih dalam terhadap pemberitaan, yaitu dalam setiap penulisan berita menyimpan ideologi atau latar belakang seorang penulis. Penulis akan memasukan ide-ide mereka dalam analisis terhadap data-data yang diperoleh di lapangan.

Media bukan hanya cuma menentukan realitas macam apa yang akan mengemuka, namun juga siapa yang layak dan tidak layak masuk dalam realitas itu. Dalam hal ini, media menjadi sebuah kontrol yang bukan lagi semata-mata sebagaimana dicita-citakan, tetapi kontrol yang mampu mempengaruhi bahkan mengatur isi pikiran dan keyakinan masyarakat itu sendiri (Sobur, 2003:14)

Ketika kebebasan pers marak seperti sekarang ini, banyak media cetak lebih mengutamakan berita yang cenderung berbau sensasional. Masalah objektivitas pemberitaan pun menjadi perdebatan klasik dalam studi media. Salah satu perdebatan yang mewakili dua pandangan pro dan kontra objektif adalah John C, Merril dan Everette E. Dennis. Merril berpendapat jurnalisme objektif mustahil.

Semua karya jurnalistik pada dasarnya subjektif, mulai dari pencarian berita, peliputan, penulisan sampai penyuntingan berita. Nilai- nilai subjektif wartawan ikut mempengaruhi semua proses kerja jurnalistik. Sebaliknya, Dennis mengatakan jurnalisme objektif bukan suatu yang mustahil, karena semua proses kerja jurnalistik pada dasarnya dapat diukur dengan nilai-nilai objektif, misalnya memisahkan fakta dan opini, menghindari pandangan emosional dalam melihat peristiwa dan meberikan perinsip keseimbangan dan keadilan serta melihat dari dua sisi. Denis percaya jurnalisme objektif mungkin jika mengadopsi metode dan produser yang dapat membatasi *subjektivitas* wartawan maupun redaktur (Siahaan, 2001:60-61)

Untuk membuat informasi menjadi lebih bermakna biasanya sebuah media cetak melakukan penonjolan–penonjolan terhadap suatu berita. Dalam pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita (Sobur, 2001:153)

Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai peluang besar untuk diperlihatkan khalayak dalam memahami realitas karena itu dalam prakteknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain, serta menonjolkan aspek isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana (Sobur, 2001:164).

Untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita peneliti memilih analisis framing sebagai metode penelitian. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagaimana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut (Eriyanto, 2005:224).

Demikian juga halnya yang terjadi pada pemberitaan seputar penangkapan tersangka kasus penerimaan suap oleh petugas KPK di tingkat Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam kedua media ini (Jawa Pos dan Kompas) sama-sama menganggap berita ini memiliki nilai berita (*news value*) yang tinggi, hal ini bisa dilihat dari sama-sama dimuatnya di kedua surat kabar tersebut. Hanya saja porsi yang berbeda, Jawa Pos mengangkat berita ini selama 1 hari di tanggal 10 Juni 2017

dan Kompas juga 1 hari saja mulai tanggal 10 Juni 2017. Untuk porsi pemberitaan jelas beda dan penulisannya media Jawa Pos lebih banyak ketimbang Kompas. Porsi penempatan Kompas tidak menaruh pada Headline melainkan bagian depan atas sebagai cuplikan pada rubrik tertentu sedangkan Jawa Pos menaruh kasus ini dalam headline.

Alasan peneliti memilih harian Jawa Pos dan Kompas dikarenakan memiliki versi pemberitaan yang berbeda itu dilakukan media cetak harian media cetak Jawa Pos dan Kompas dalam membingkai sebuah peristiwa yang dipengaruhi oleh beberapa macam hal. Alasan lain memilih surat kabar Jawa Pos karena adanya unsur kedekatan jarak yang merupakan surat kabar lokal dimana di dalam kebijakan redaksionalnya, surat kabar ini mampu mengadakan kebebasan pers dan tidak hanya mengungkap berita-berita bersifat umum melainkan juga berita-berita politik dan kriminal.

Oleh karena itu dalam penyampaian berita menghendaki dan mengarahkan pada sesuatu yang lain daripada yang lain, dengan menampilkan rubrik tertentu sebagai nominasi unggulan, berita-berita, reportase, gambar kartun, hiburan yang bersifat kreatif juga tidak ketinggalan berita yang bersifat kesenangan. Serta alasan peneliti memilih surat kabar Kompas karena surat kabar Kompas dinilai merupakan surat kabar yang terkenal dan netral serta obyektif dalam menulis beritanya.

Selain itu Kompas merupakan harian yang memiliki gaya penulisan cenderung “tertutup dan bersahaja dalam menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat, dan Kompas juga memiliki reputasi ke dalam analisa dan gaya penulisan yang rapi. Harian Kompas sangat diakui keberadaannya di Indonesia dan tegas menulis realitas. Kompas termasuk media yang menganut *system both cover* atau menyajikan dua sisi yang berbeda (Oetama, 2001:111).

Perbedaan Kompas dan Jawa Pos dalam mengkontruksi atau membingkai berita dikarenakan adanya perbedaan cara pandang wartawan dari masing-masing media dalam mempersepsikan kasus tersebut. Perbedaan dari cara kedua harian tersebut dalam mengemas berita disebabkan adanya perbedaan kebijakan redaksi dan juga perbedaan kebijakan visi dan misi dari masing-masing media tersebut, visi dan misi Jawa Pos adalah menjadikan surat kabar yang menginformasikan berita kepada khalayak yang baru.

Harian Jawa Pos ini memiliki misi idiiil dan misi bisnis sebagai pilar utama uttuk kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu penyampaian berita menghendaki dan diarahkan pada sesuatu yang lain daripada yang lain dengan menampilkan rubrik-rubrik tertentu sebagai nominasi unggulan berita-berita aktual, reportase, gambar kartun, hiburan-hiburan yang bersifat kreatif juga tidak ketinggalan berita yang bersifat kesenangan (*human interest*).

Sedangkan Kompas merupakan pers nasional yang mempunyai visi dalam keredaksionalannya yaitu manusia dan kemanusiaan, sehingga harian ini berusaha senantiasa peka akan nasib manusia dan meningkatkan yang mapan (Oetama, 2001:147), dipilihnya harian Kompas karena harian yang paling laku di Indonesia (lebih setengah juta kopi terjual setiap harinya) dan juga merupakan surat kabar berkualitas terbesar di Asia Tenggara, selain itu Kompas memiliki reputasi kedalaman analitis dan gaya penulisan yang rapi. Kompas juga memiliki kerajaan bisnis yang terdiri dari 38 perusahaan yang dikenal sebagai Kompas-Gramedia Group. Melalui berbagai buku, majalah, dan surat kabar, Kompas-Gramedia Group mendominasi industri penerbitan. (Sen and Hill, 2001: 68-69).

Periode yang dipilih dalam penelitian ini adalah pada Jawa Pos tanggal 10 Juni 2017 dan Kompas 10 Juni 2017 karena periode tersebut pada harian Kompas dan Jawa Pos memuat berita tentang Operasi Tangkap Tangan KPK di Lembaga Hukum Negara tingkat Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana harian Jawa Pos dan Kompas membingkai berita tentang kasus penyusunan lembaga Kejaksaan Tinggi Bengkulu?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembingkai berita pada Surat kabar Jawa Pos dan Kompas dalam berita tentang penyusunan lembaga Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah kajian dalam bidang ilmu komunikasi terutama yang menggunakan metode kualitatif dan terkhusus yang menggunakan analisis *framing*. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang strategis yang digunakan media dalam membingkai berita tentang penyuaapan lembaga Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi jurnalistik serta media massa, khususnya Jawa Pos dan Kompas dalam mengkontruksi berita yang disampaikan pada khalayak.
- b. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang tertarik dengan penelitian teks media khususnya yang menggunakan metode analisis *framing*.